



RSUD Tolak Pasien Miskin Sebaiknya Ditutup

JAKARTA (Pos Kota) – Komisi IX DPR menantang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk menutup RSUD (Rumas Sakit Umum Daerah) yang berani menolak pasien kelas bawah. Sebab, penolakan ternyata masih saja terjadi, padahal RSUD itu dibiayai rakyat lewat APBN dan APBD.

“Berani nggak saudara Menteri Kesehatan menutup rumah sakit yang menolak pasien itu. Rasa kemanusiaannya bagaimana sih, pasien sakit kok ditolak,” kata anggota Komisi IX DPR Ribka Tjip-taning dalam rapat kerja (raker) dengan Menkes Prof Nila F Moeloek, di DPR, Rabu (21/1).

Menurutnya, memang ada saja alasan rumah sakit menolak pasien, misalnya kelas tiga sudah tidak ada kamar. Semua sudah penuh. Menurut Ribka, ini akibat RS dibuat berkelas, seharusnya agar mampu melayani rakyat banyak, dibuat RS tanpa kelas.

“Itulah kalau RS dibuat kelas-kelas. Dokternya akan murah senyum kalau melayani kelas 1, karena membayar mahal. Dengan dicanangkan revolusi mental, hal seperti ini harus diubah,” katanya.

Ribka menyatakan, dengan revolusi mental itu juga dibutuhkan seorang menteri kesehatan yang revolusioner juga, harus rajin turun ke bawah, memantau langsung, sidak, dan lainnya. “Kalau hanya bikin laporan ke Presiden dengan angka-angka, siapa pun bisa. Menkes jangan textbook, harus revolusioner, tongkrongin RS pemerintah, beri sanksi yang melanggar,” tegasnya.

TOLAK PASIEN

Ribka geram dengan kejadian di RSUD Lampung yang menolak pasien. Akibat penolakan itu, pasien keluar dan didorong dengan gerobak. Akhirnya, pasien itu meninggal. “Ini bagaima-

na dokternya, mereka kan sudah terikat sumpah dokter dan UU Kesehatan yang melarang RS menolak pasien. Kepala RSUD Lampung itu akan kami panggil ke DPR,” katanya.

Meski dari FP-DIP, Ribka pun mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang bagi-bagi kartu dalam berbagai jenis, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pinta (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurutnya, hal ini kalah dengan Tangerang yang hanya memberlakukan satu kartu, tapi multifungsi, bisa untuk berobat, pendidikan, dan kebutuhan keluarga.

“Ini kok jadi mainan kartu. Siapa yang main, cetak 400 ribu kartu sudah berapa miliar. Kalah sama Tangerang, satu kartu bisa multifungsi,” katanya.

Sementara itu anggota Fraksi PPP Irgan Chairul Magfis menyatakan, komitmen pemerintahan Presiden Jokowi hanya omong kosong. Itu ditunjukkan dengan minimnya anggaran untuk kesehatan. “Kalau sejumlah BUMN akan disuntik Rp46 triliun, mana untuk kesehatan, hanya kecil sekali, ini kan omong kosong,” katanya. (bu)